



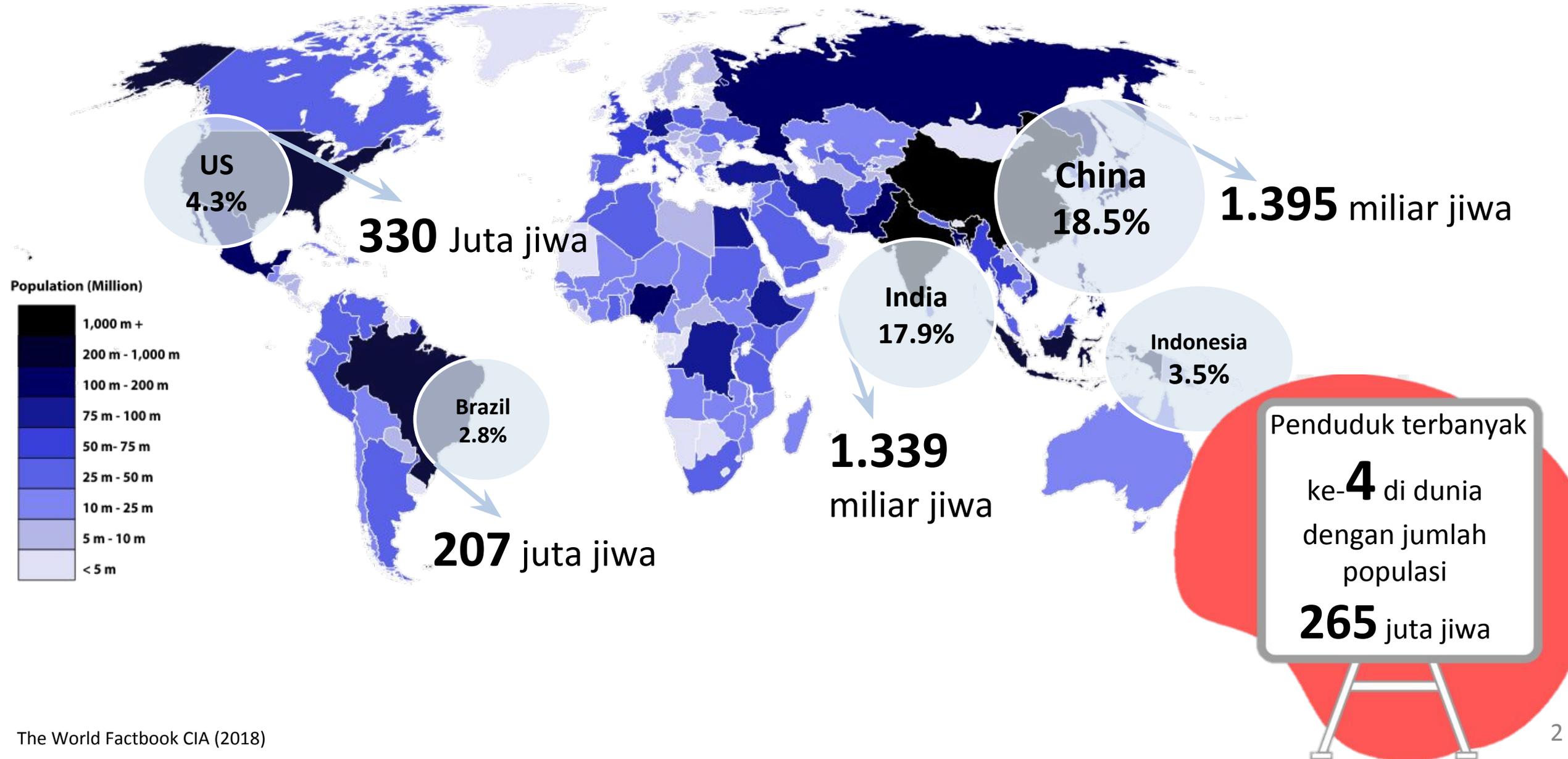
ISU KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN



Ratna Susianawati, S.H., M.H.

Staff Ahli Menteri PPPA Bidang Komunikasi Pembangunan

POTRET PENDUDUK DUNIA

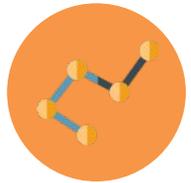


POTRET PENDUDUK INDONESIA



Jumlah Penduduk Indonesia

Pada tahun **1971** sebanyak **119,2** juta jiwa.



Jumlah Penduduk Terus Bertambah

Lebih dari **2** kali lipat pada tahun

2015 mencapai **255,2**

juta jiwa. Menempatkan Indonesia sebagai negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar setelah China, India, USA.



Kepadatan Penduduk

134 jiwa/km persegi atau

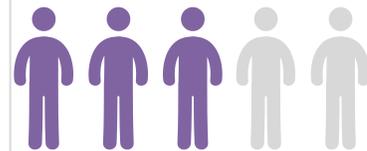
2 kali lipat di tahun **2015** dibandingkan tahun 1971.

	1980	1990	2000	2010	2015
Total Populasi	146.776.473	179.247.783	201.241.999	237.641.326	255.182.144
Populasi Usia 60+	7.998.543	11.277.560	14.439.967	18.043.712	21.609.717
Persentase Lansia terhadap total penduduk (%)	5,4	6,3	7,2	7,6	8,5



Diperkirakan pada tahun 2017, jumlah penduduk bertambah menjadi sebesar **261,8** juta jiwa (Proyeksi Penduduk 2010-2035).

Jumlah Penduduk



50,3%
128,2 juta

Jumlah Remaja 10 – 19 Tahun



51,2%
22,8 juta



49,7%
126,9 juta



48,8%
21,8 juta

Jumlah Anak Usia <18 tahun

84 juta, 33% dari penduduk Indonesia



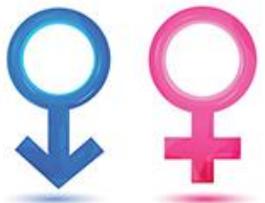
Anak Laki-Laki
43 juta

Anak Perempuan
41 juta

Hak setiap warga negara untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang.



GENDER : Mencakup semua segmen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.



Gender dan Jenis Kelamin

Perempuan

Laki-laki

PERBEDAAN

JENIS KELAMIN:

Kodrati, universal,
tidak berubah

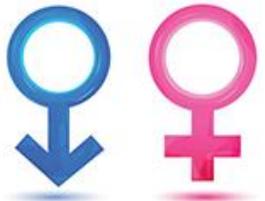
GENDER:

Konstruksi sosial,
dapat berubah,
Dapat ditukar

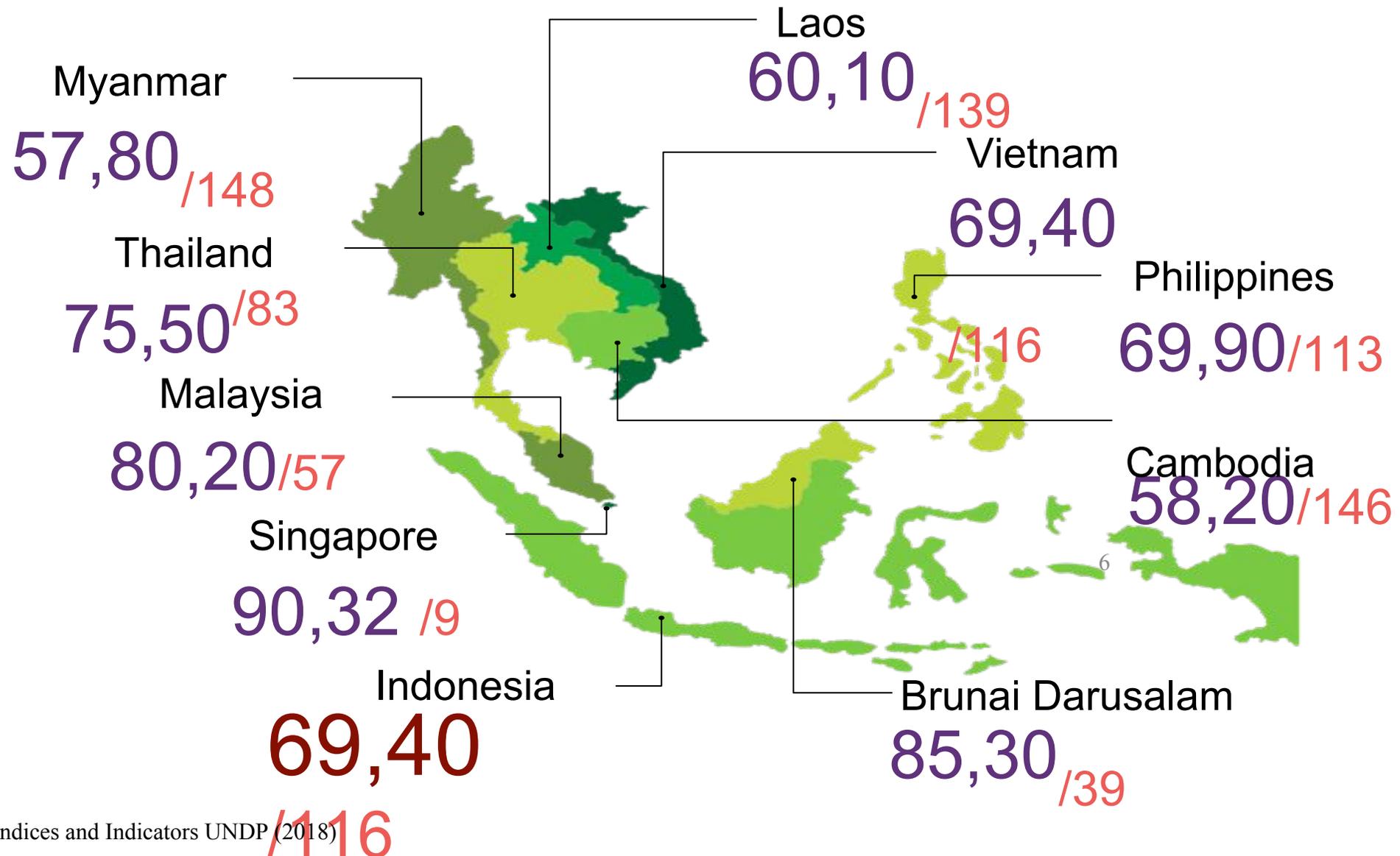
Tidak menyebabkan
kesenjangan/
ketidakadilan

Dapat menyebabkan
kesenjangan/
ketidakadilan

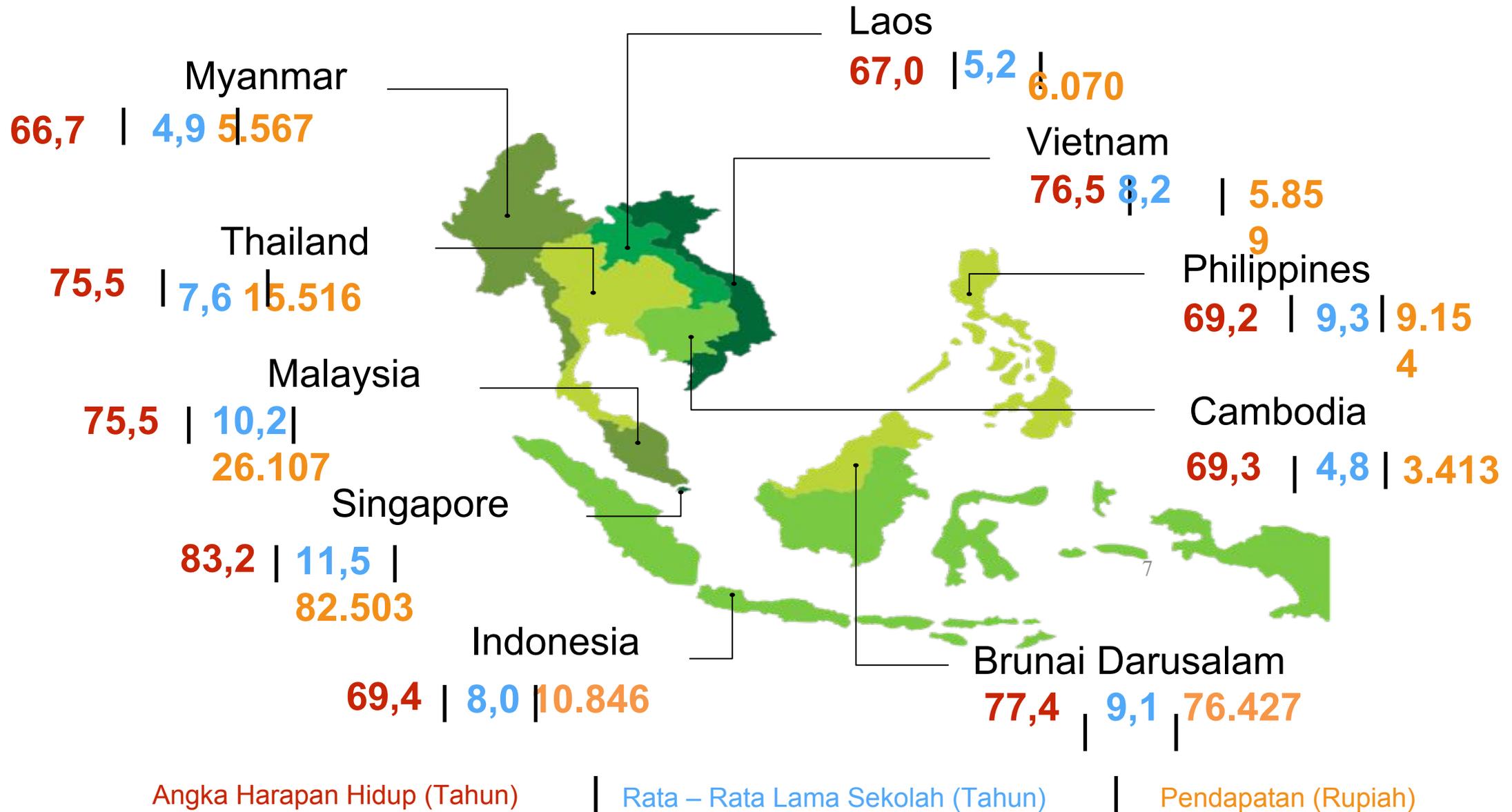
Status ekonomi,
status sosial,
kondisi fisik, umur,
etnis, geografis



Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN



Komponen IPM di ASEAN



ISU GENDER DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN

Kesehatan

Indonesia termasuk negara ASEAN dengan AKI tertinggi. Menurut data SDKI pada 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, menurut Supas tahun 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup

Kekerasan terhadap Perempuan

1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual sepanjang hidupnya dan 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (SPHPN, 2016)

Perkawinan Anak

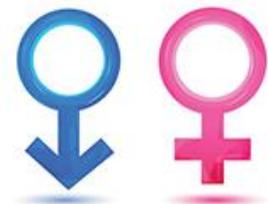
Tahun 2016, sekitar 22,4% perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin menikah pertama kali < usia 18 tahun dan sekitar 1,1% menikah pertama kali sebelum usia 15 tahun (Susenas)

Ekonomi

- Tahun 2016, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sebesar 50,8%.
- Perempuan lebih banyak menjadi penganggur terbuka (5,5%) dibandingkan laki-laki (5,7%)
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sebanyak 50,8% dan laki-laki 82,0% (BPS, Agustus 2016a)

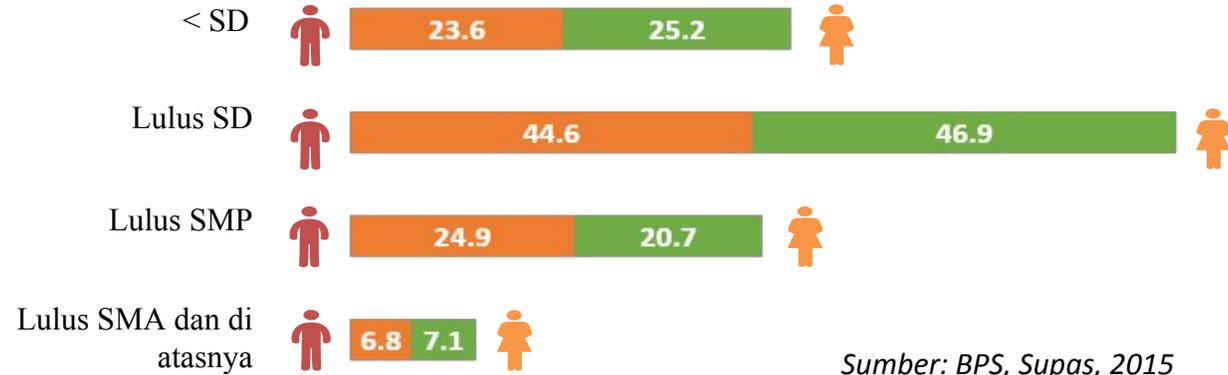
Politik

- Keterwakilan perempuan di DPR mengalami penurunan dari sekitar 17,9% pada periode 2009-2014, menjadi 17,3% pada periode 2014-2019 (BPS, 2015)
- Keterwakilan perempuan dalam jabatan eselon I sebanyak 18% dan eselon II sebanyak 13% (BKN, 2015).



KESENJANGAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Proporsi Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, 2015 (Persen)



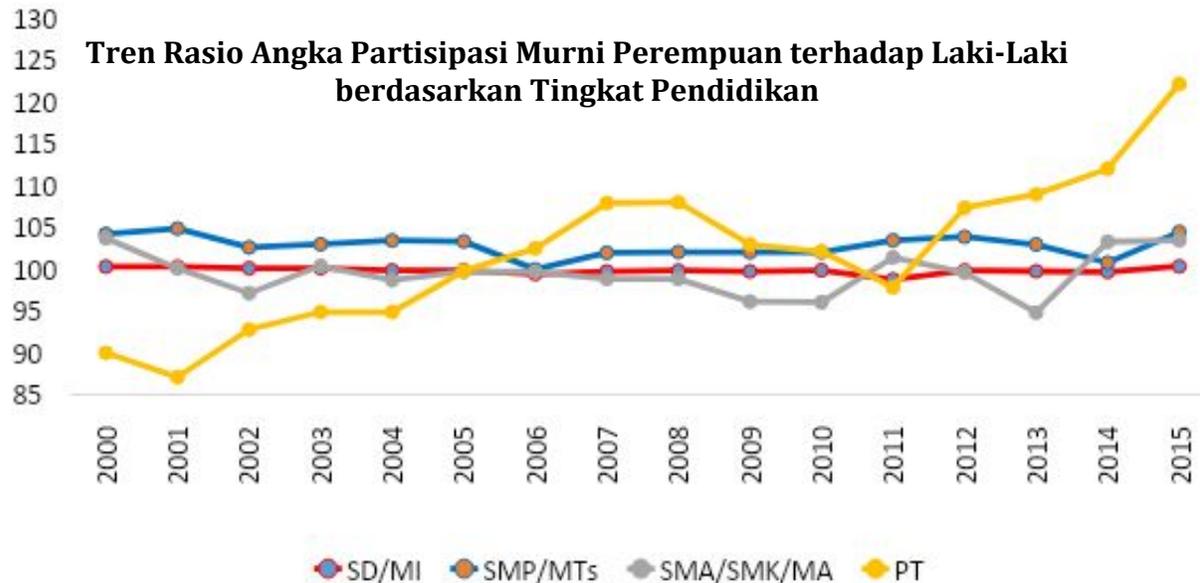
Sumber: BPS, Supas, 2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 2011-2017 (Persen)



Sumber : Sakernas Agustus 2011-2017 (BPS)

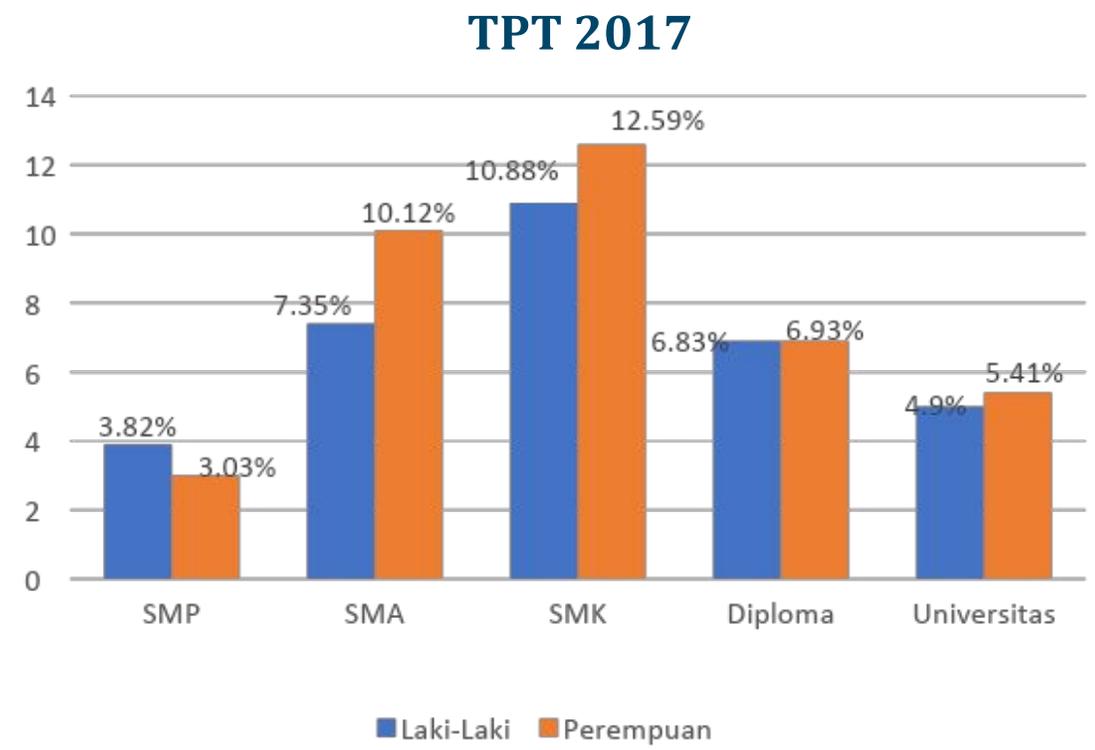
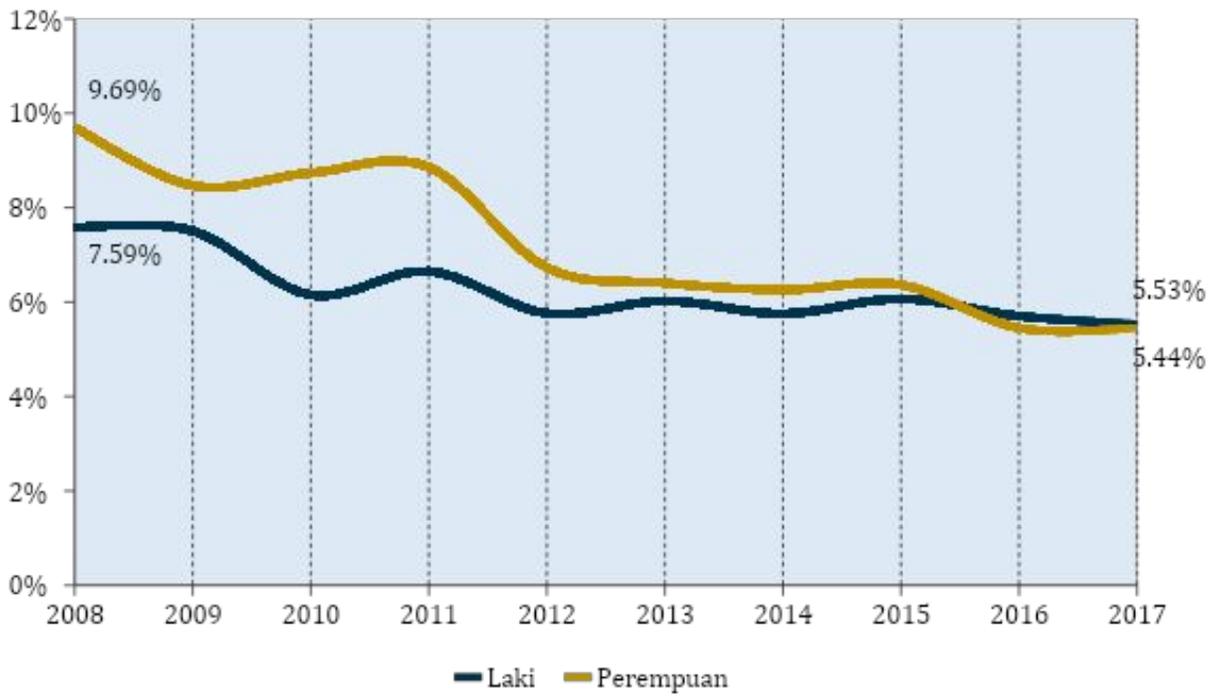
Tren Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan terhadap Laki-Laki berdasarkan Tingkat Pendidikan



Source: BPS, Susenas

- **Status pendidikan perempuan lebih tinggi, namun TPAK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki**
 - TPAK perempuan yang rendah menjadi salah satu penyebab pilar daya saing efisiensi pasar kerja Indonesia berada pada peringkat bawah (96 dari 137 negara).
 - Perempuan berpotensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian Indonesia. Jika TPAK perempuan dinaikkan menjadi 64% (sama seperti Thailand), maka akan terdapat 20 juta angkatan kerja *semi-skilled* dan *skilled* baru.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PEREMPUAN DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH-TINGGI LEBIH BESAR DARIPADA LAKI-LAKI



10

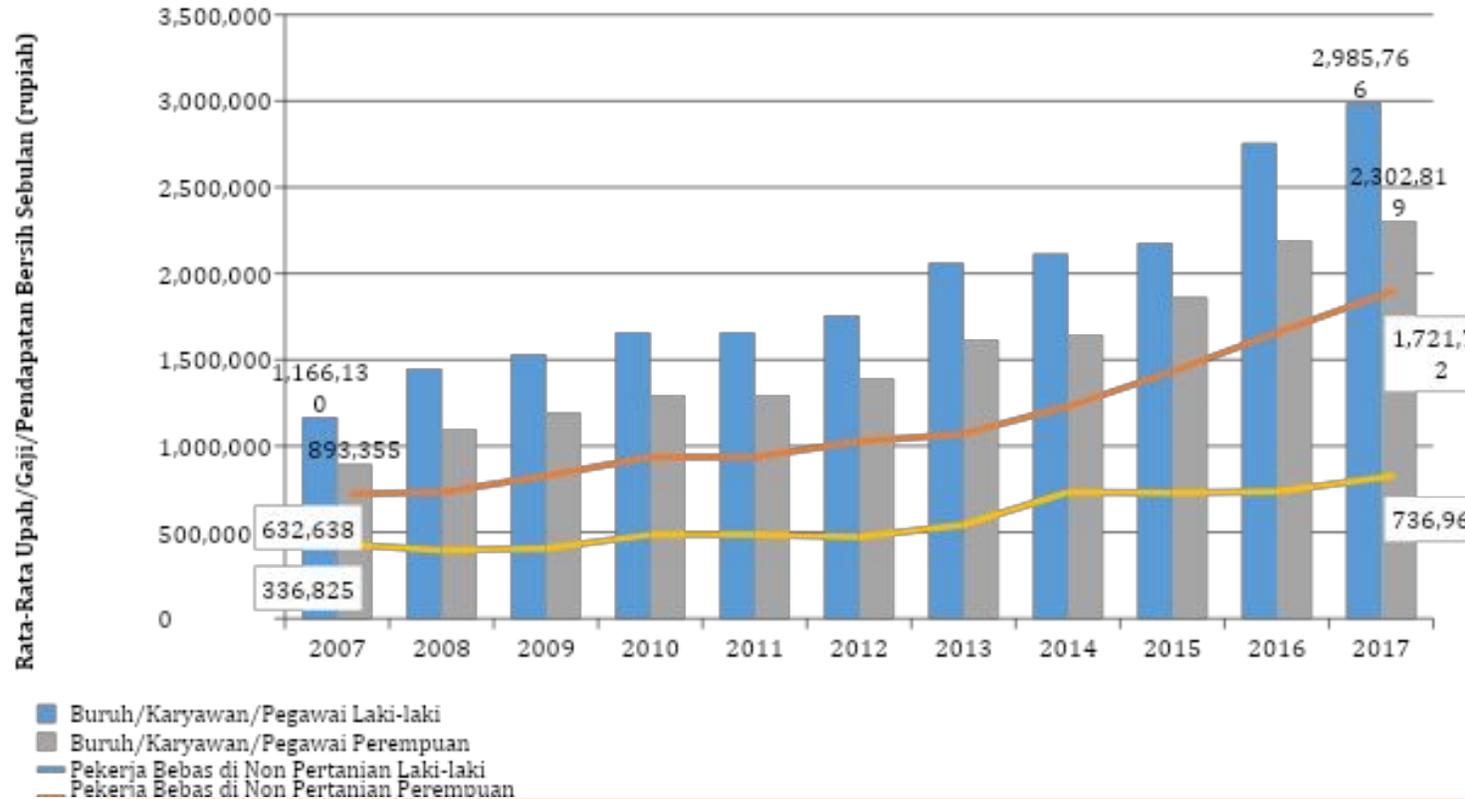
Sumber: Sakernas Periode Agustus

Tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan cenderung menurun 10 tahun terakhir.

- TPT laki-laki dan perempuan cenderung menurun. Mulai 2013 perbedaan TPT antara perempuan dan laki-laki menipis.
- TPT perempuan lulusan SMA dan SMK lebih tinggi daripada laki-laki, sedangkan tingkat pendidikan lainnya tidak jauh berbeda.



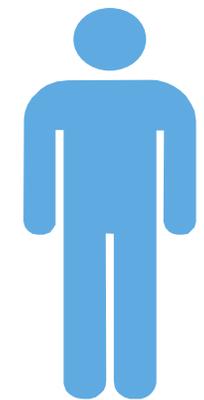
MESKIPUN BEKERJA, UPAH PEREMPUAN UNTUK PEKERJAAN DAN JABATAN YANG SAMA MASIH LEBIH RENDAH



Upah Pekerja
Rata-rata upah pekerja perempuan hanya sekitar **79%** dari upah pekerja laki-laki



Rp2.070.274



Rp2.624.319

2017

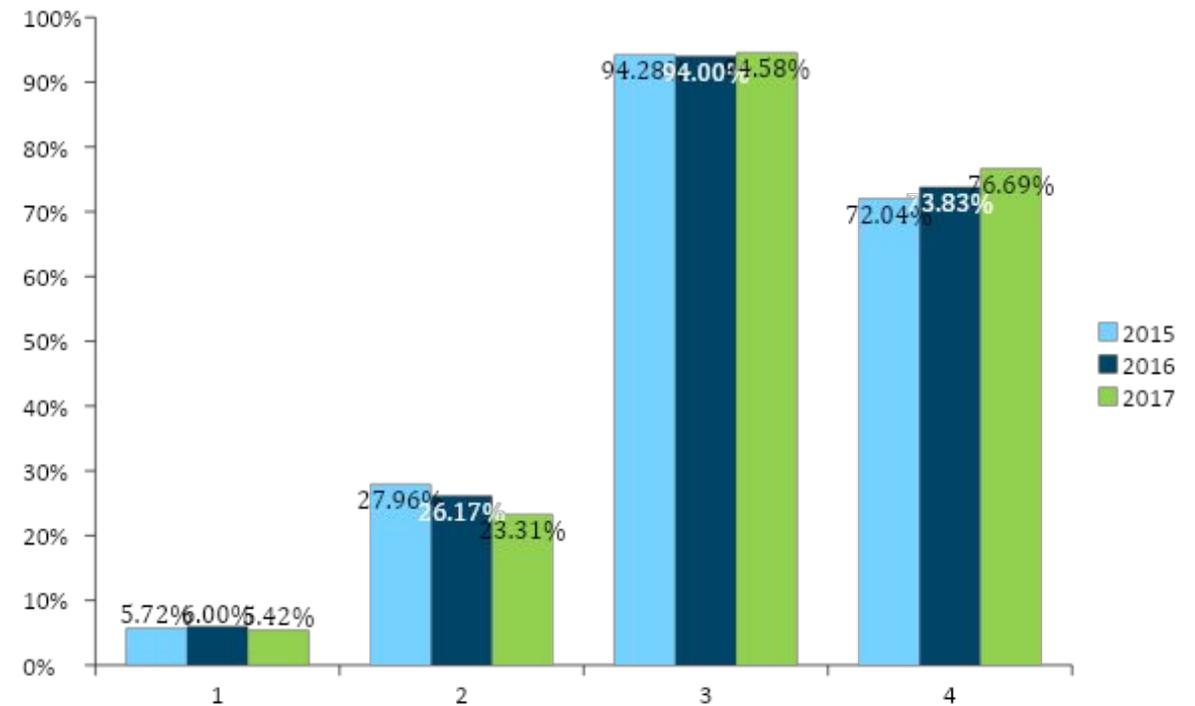
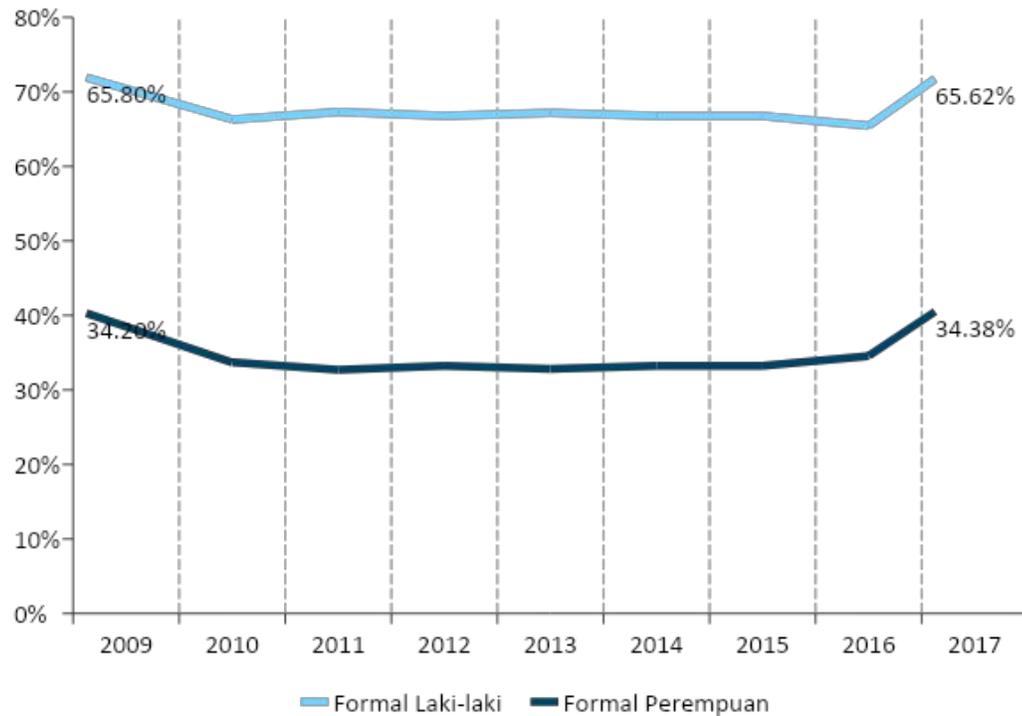
Sumber: Sakernas Periode Agustus

Upah perempuan di pekerjaan upahan lebih rendah daripada upah laki-laki.

- Meskipun upah nominal cenderung terus meningkat, namun perbedaan antara upah laki-laki dan perempuan tidak mengalami penurunan.
- Prinsip *equal employment opportunity* telah diatur di Indonesia, tetapi diskriminasi masih terjadi dalam pemberian upah, terutama upah pekerja/buruh yang tingkat pendidikannya rendah.



PROPORSI PEREMPUAN BEKERJA DI LAPANGAN KERJA RENTAN (INFORMAL) LEBIH TINGGI



12

Sumber: Sakernas Periode Agustus

Perempuan bekerja lebih rentan.

- Proporsi laki-laki dalam lapangan kerja formal hampir dua kali lipat perempuan. Dalam 10 tahun terakhir proporsi tersebut cenderung stagnan.
- Perempuan yang bekerja pun masih rentan dan sangat mudah terpengaruh oleh guncangan ekonomi. Terdapat **23,3%** pekerja perempuan adalah **pekerja tak dibayar/pekerja keluarga**.



KESENJANGAN GENDER DI BIDANG KESEHATAN

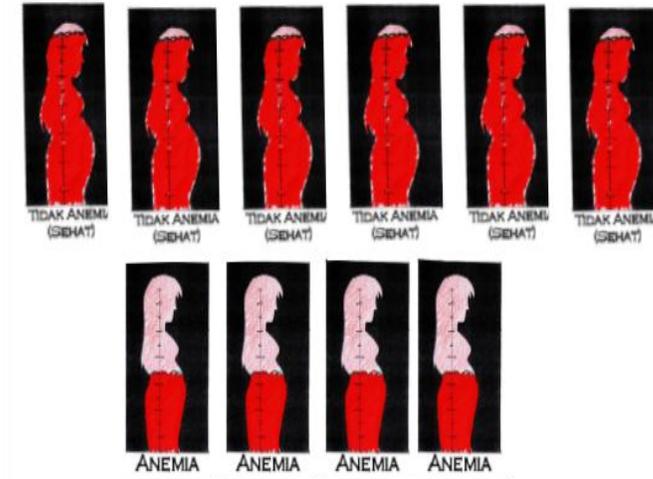
Target Angka Kematian Ibu (AKI)

Target AKI Tahun 2030

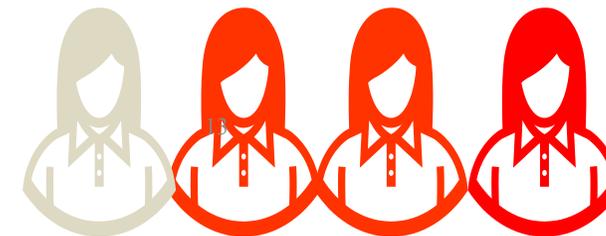
sebesar **102**,
sementara pada
Tahun 2015 AKI
mencapai **305**.



Kematian ibu paling banyak
terjadi di RS Pemerintah sebesar
41,9%



**37.2% or 4 dari 10 ibu hamil
menderita Anaemia**



**24.2% ibu hamil mengalami Kekurangan
Energi Kronik (KEK)**



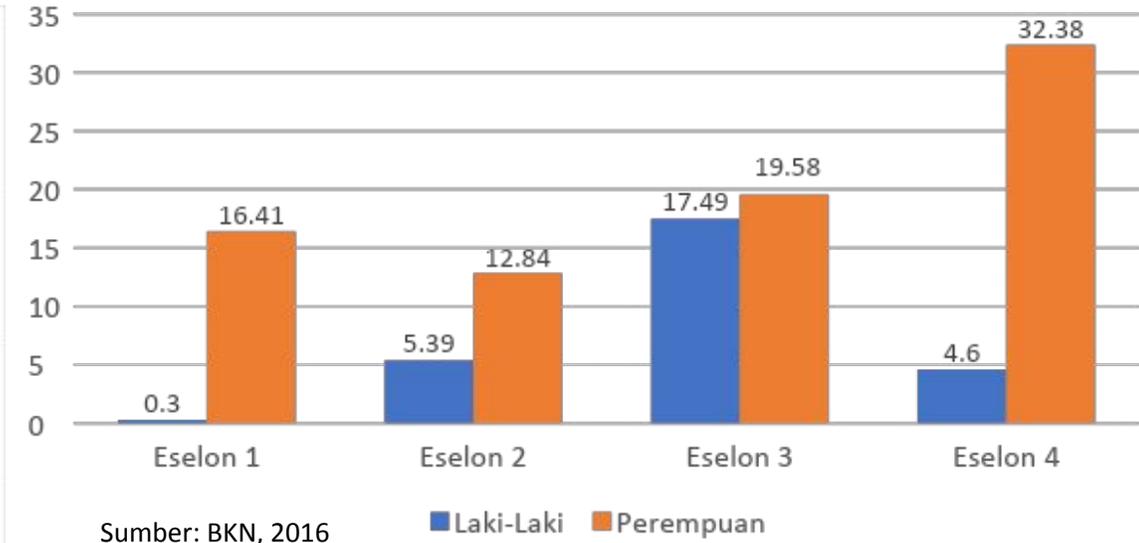
KESENJANGAN GENDER DI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Proporsi Perempuan di Lembaga Legislatif di Tingkat Pusat



Sumber: BPS

Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon I-IV Tahun 2016

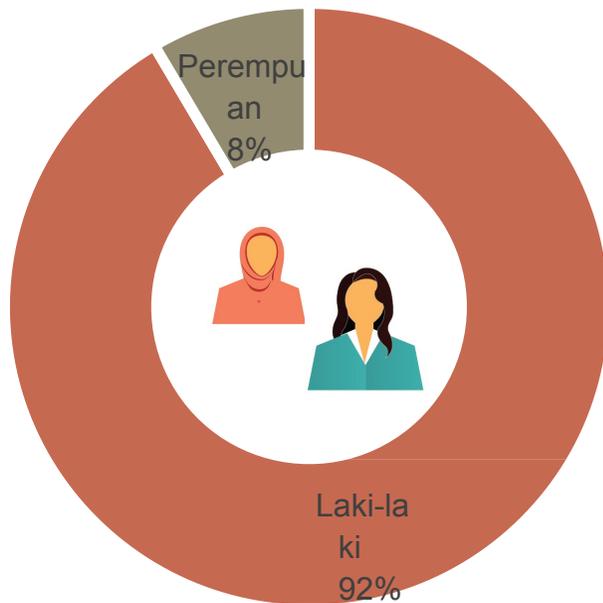


Sumber: BKN, 2016

- Masih rendahnya dan menurunnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR).
- Masih ada kesenjangan antardaerah terkait keterwakilan perempuan di DPR menurut provinsi
- Pengambil keputusan di lembaga Eksekutif (dan Yudikatif) masih belum berimbang antara pejabat laki-laki dan perempuan di semua eselon

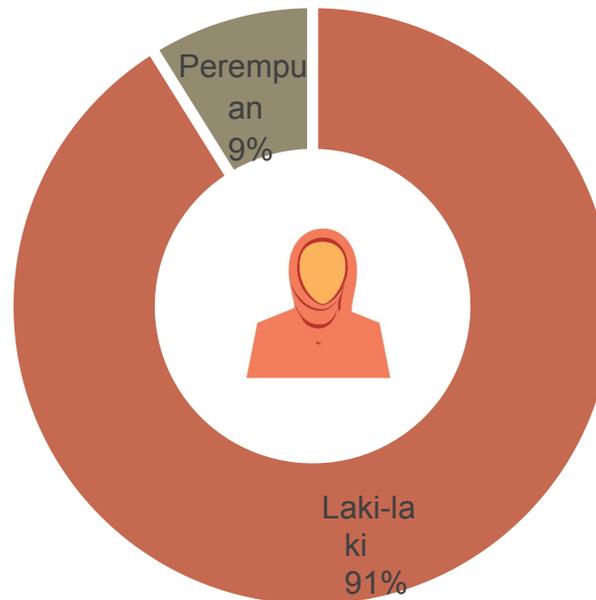
REKAPITULASI JUMLAH PEREMPUAN HASIL PILKADA 2015-2018

Total



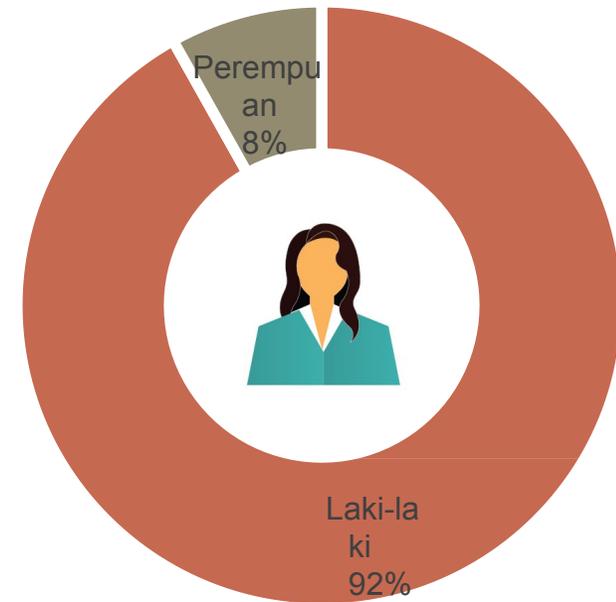
92 perempuan dari 1084 kepala dan wakil kepala daerah terpilih (**8.49 persen**)

Kepala Daerah

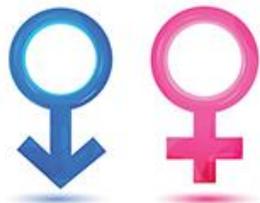


48 perempuan dari 542 kepala daerah terpilih (**8.86 persen**)
1 Gubernur, 39 Bupati, 8 Walikota

Wakil Kepala Daerah

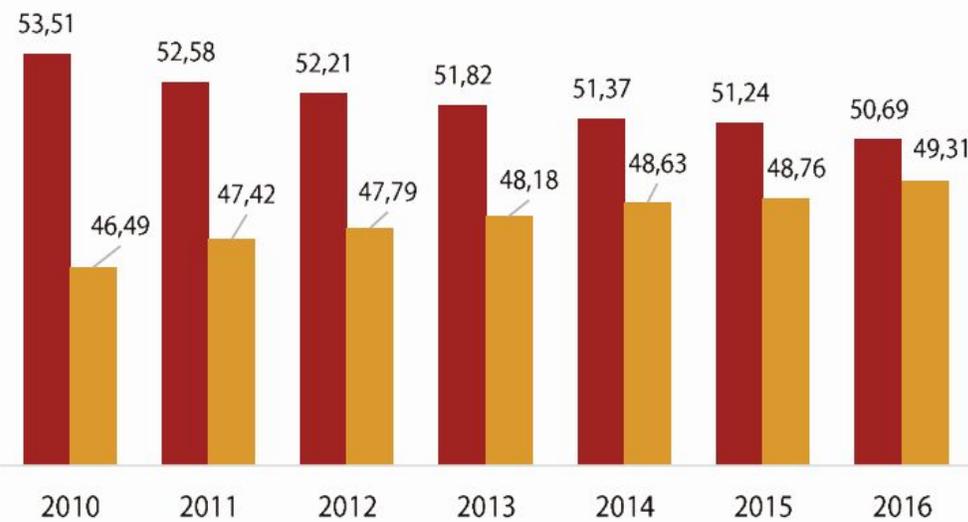


44 Perempuan dari 542 wakil kepala daerah terpilih (**8.12 persen**)
3 Wagub, 31 Wabup, 10 Wawalkot





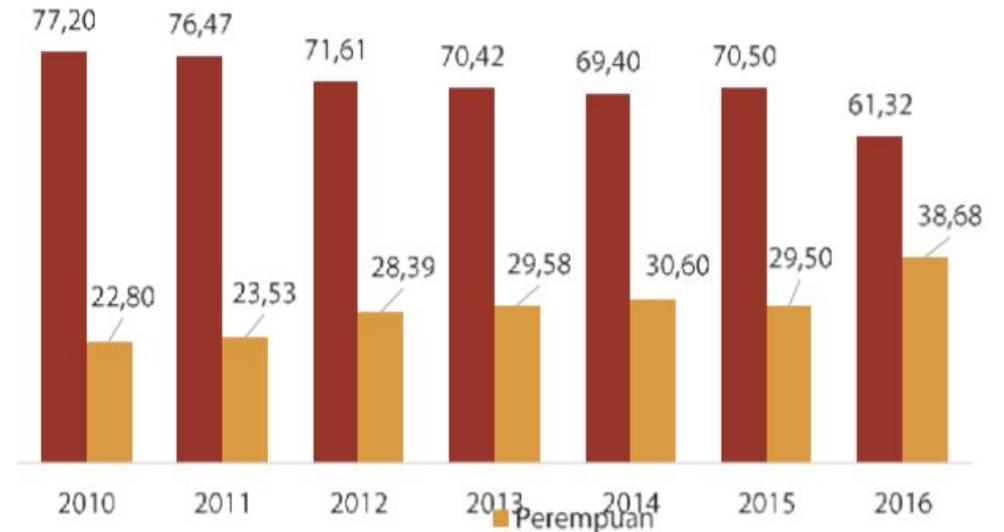
Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2016



■ Laki-laki ■ Perempuan

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 (BPS, 2016c)

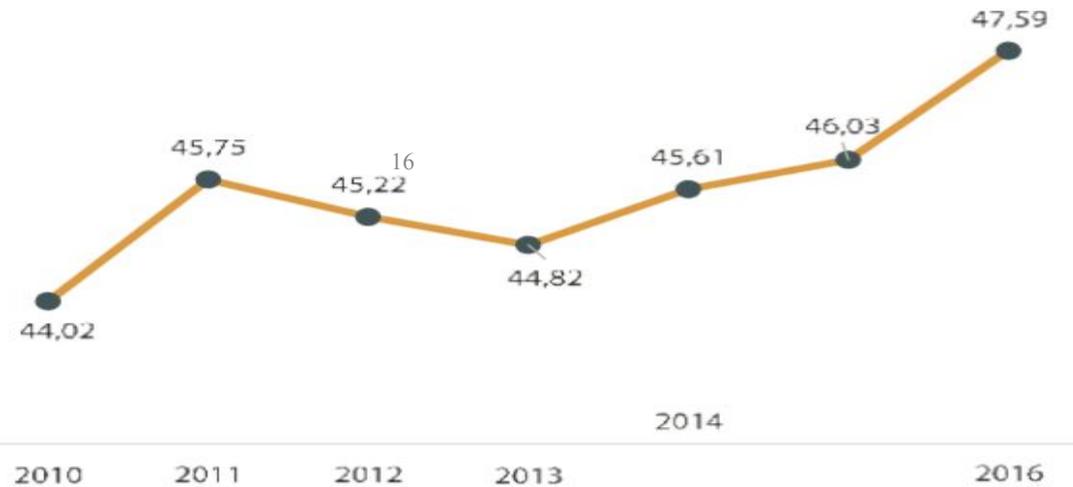
Persentase ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin, 2010-2016



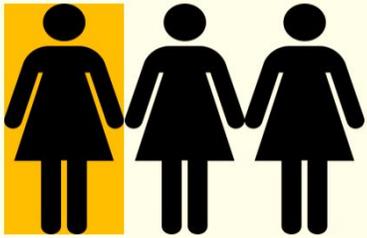
■ Laki-laki

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 (BPS, 2016)

Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, 2010-2016

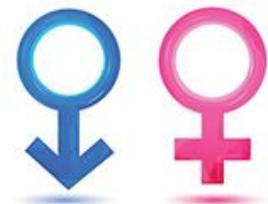
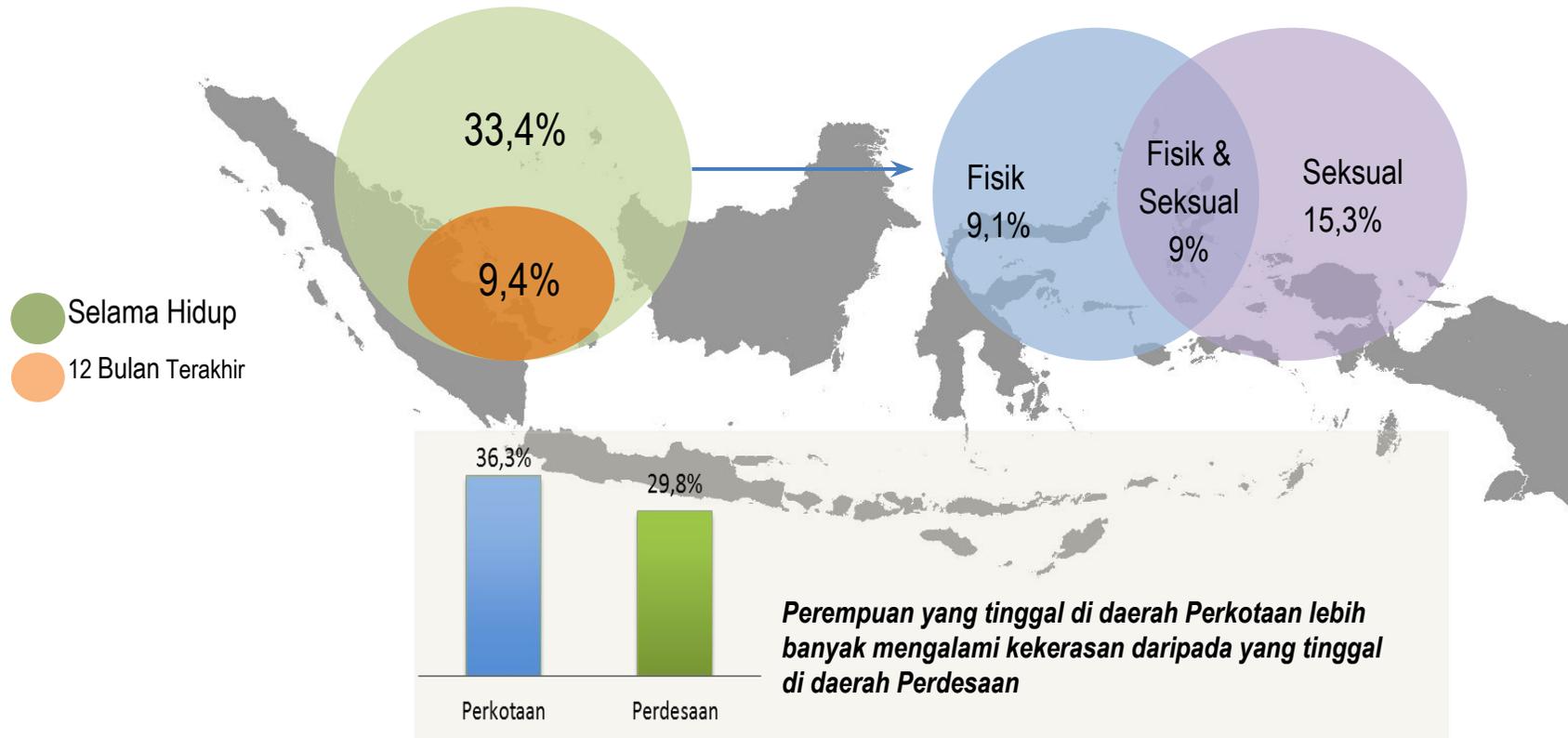


Sumber: Badan Pusat Statistik



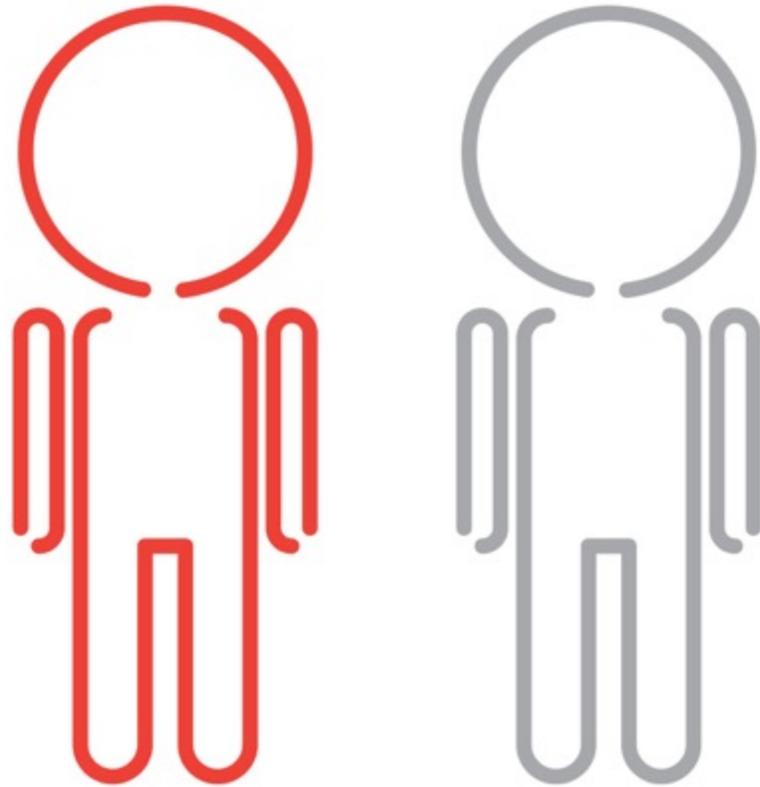
1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

PREVALENSI KEKERASAN FISIK DAN/ ATAU SEKSUAL OLEH PASANGAN DAN SELAIN PASANGAN





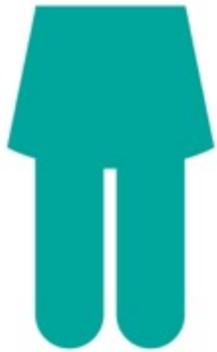
**3 DARI 5 ANAK
PEREMPUAN
MENGALAMI
KEKERASAN
EMOSIONAL**



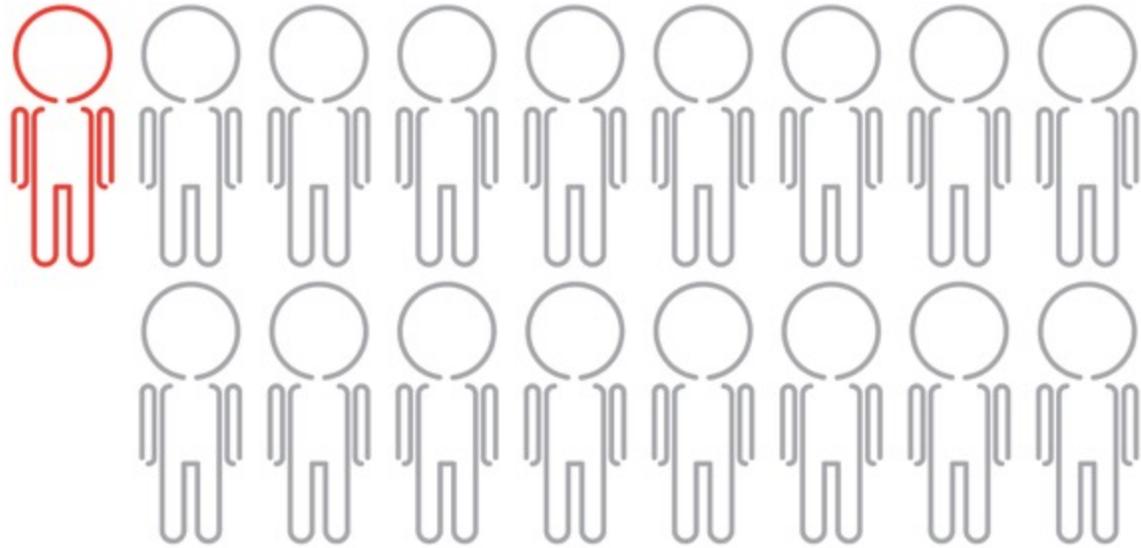
1 DARI 2 ANAK LAKI-LAKI
MENGALAMI KEKERASAN
EMOSIONAL



1 DARI 5 ANAK PEREMPUAN MENGALAMI KEKERASAN FISIK







1 DARI 17
ANAK LAKI-LAKI
MENGALAMI
KEKERASAN SEKSUAL



1 DARI 11
ANAK PEREMPUAN
MENGALAMI
KEKERASAN SEKSUAL

KESIMPULAN SNP HAR 2018

2 dari 3 anak-anak dan remaja perempuan atau laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya

Kekerasan yang dialami oleh anak dan remaja cenderung tidak berdiri sendiri tetapi bersifat tumpang tindih diantara jenis kekerasan. Anak-anak dan remaja yang hanya mengalami **kekerasan seksual saja** adalah 0,2%-1.2%, **kekerasan fisik saja** sebesar 2%—8, dan **kekerasan emosional saja** mberkisar 23%-36%.

3 dari 4 anak-anak dan remaja yang pernah mengalami kekerasan salah satu jenis atau lebih melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman atau sebayanya

1 dari 3 anak-anak dan remaja mengetahui tentang layanan untuk mengantisipasi kekerasan dan pemanfaatan layanan masih terbatas



Nawacita

Negara hadir, Membangun Indonesia dari Pinggiran, Meningkatkan kualitas hidup, produktifitas dan daya saing serta kemandirian sosial

Pelembagaan di daerah
UU No. 23 Tahun 2014
-Urusan wajib non pelayanan dasar

Komitmen Global

- CEDAW
- Konvensi Hak Anak
- SDG's
- dll

Pembangunan PP dan PA

Arah Kebijakan

Bidang
Pembangunan
KG-PP

Bidang Pembangunan
PA

RPJPN s.d 2025 ada 3 strategi pembangunan :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pembangunan yang berkelanjutan
3. Pengarusutamaan Gender

Perpres No. 2 Tahun 2015
tentang RPJMN

Masih ada kesenjangan
APKM (Akses, Partisipas, Kontrol, Manfaat) -> khususnya terhadap perempuan dan anak

Strategi PUG Melalui PPRG



Nasional:

- UUDN 1945
- UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
- UU Nomor 11 tahun 2005 tentang ECOSOC
- UU Nomor 12 tahun 2005 tentang politik
- UU Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda

Manusia

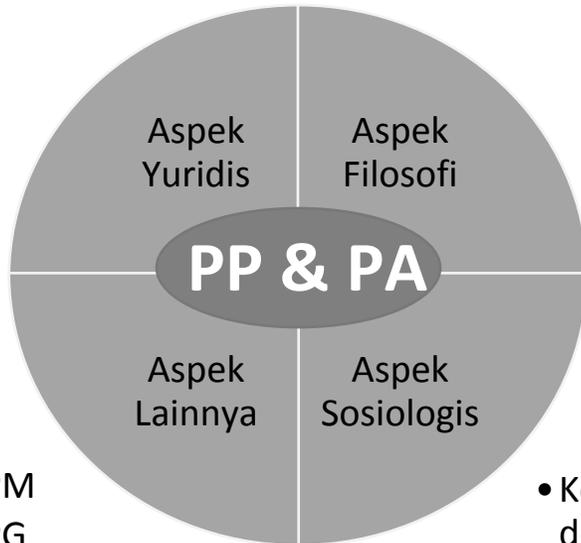
(Laki-laki, Lansia, Disabilitas & rentan lainnya)

Perempuan

Anak

Nasional/Internasional/Global

Sosial
Politik
Hukum



- Pendekatan HAM
- Aset bangsa

- UU No 23/2004 tentang PKDRT
- UU No 21/2007 tentang PP TPPO
- UU No 44/2008 tentang Pornografi
- UU No 6/2014 tentang Desa
- UU No 8/2016 tentang Disabilitas
- Inpres No 9/2000 tentang PUG dalam pembangunan

- UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak
- UU No 17/2016 tentang Perlindungan Anak
- Keppres No 36/1990 tentang ratifikasi konvensi Hak Anak (CRC)
- Keppres No 77/2003 tentang KPAI

- IPM
- IPG
- IDG

- Kondisi demografi
- Sosial budaya

Diterjemahkan dalam program:

1 Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan

2 Perlindungan Anak

3 Partisipasi Masyarakat

4 Dukungan Manajemen



KESETARAA N GENDER

GENDER

Mencakup semua segmen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

PUG sebagai salah satu strategi pembangunan

- RPJPN 2005 – 2025 (ada 3 strategi) : Tatakelola pemerintahan yang baik
Pembangunan berkelanjutan
Pengarusutamaan gender
- Strategi bertujuan : menyelesaikan persoalan kesenjangan antar manusia;
- Mengukur : akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat (APKM);
- Menggunakan instrumen PPRG (GAP & GBS);
- Bersifat “cross cutting issues”;
- Berdampak untuk pencapaian IPM suatu negara;
- Bukan alokasi anggaran baru/tambahan.

EQUAL

Hak setiap warga negara untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang.

Pelembagaan PUG di pusat dan daerah

Pemenuhan prasyarat PUG

Implementasinya

Inovasi/terobosan

Monitoring & Evaluasi

APE

Baseline kemajuan PUG di pusat & daerah

Sebagai bahan:

Intervensi

- Kolaborasi & sinergi
- Inovasi
- Pemanfaatan teknologi

Institusionalisasi

- Holistik
- Integratif
- Berkelanjutan

Percepatan PUG di bidang pembangunan

EKONOMI

- Pemberdayaan ekonomi perempuan dengan model Industri Rumahan

POLHUKAM

- Pendidikan politik perempuan di lembaga masyarakat & organisasi kemasyarakatan
- Peningkatan keterwakilan perempuan di politik & pengambilan keputusan
- Bela Negara

DIKESGA

- PTKAI yang responsif gender
- Pembangunan sekolah perempuan
- Pencegahan penyakit menular & tidak menular
- Ketahanan keluarga

INFRALINK

- Perubahan iklim
- Ketahanan energi
- Pelayanan publik yang responsif gender
- Literasi Digital

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

- 1 Perlindungan
- 2 Penanganan
- 3 Pemberdayaan



Isu yang ditangani:

Kekerasan Terhadap Perempuan

Perdagangan Manusia

Perempuan dalam situasi darurat

Lansia, Disabilitas

Pekerja Migran

Apa yang sudah dilakukan ?

Perlindungan Perempuan dari kekerasan:

- Kampanye *massive*/ gerakan masyarakat untuk pencegahan kekerasan;
- Mendorong & melaksanakan regulasi untuk pencegahan kekerasan (UU ttg KDRT, RUU ttg PKS);
- Pelatihan APH;
- Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional.

Perlindungan Perempuan dari Perdagangan Manusia:

- Mengefektifkan Gugus Tugas TPPO;
- Kampanye *massive*/ gerakan masyarakat untuk pencegahan *trafficking*;
- Pembentukan *community watch*

Perlindungan Perempuan dalam situasi darurat & kondisi khusus:

- Perempuan dalam situasi bencana;
- Perempuan dalam situasi konflik sosial;
- Pemberdayaan perempuan lansia, disabilitas, penggiat isu perdamaian.

Perlindungan Perempuan dalam ketenagakerjaan:

- Pelatihan calon TKI
- Pembentukan BK TKI



PERLINDUNGAN ANAK

- Konvensi Hak Anak
- UU Nomor 23 Tahun 2002
- UU Nomor 35 Tahun 2014
- UU Nomor 1 Tahun 2017

Klaster 5 KHA Perlindungan Khusus

Isu yang ditangani meliputi perlindungan terhadap:

- Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
- Anak Berkebutuhan Khusus
- Kekerasan Terhadap Anak
- Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi

Apa yang sudah dilakukan ?

1

Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum & Stigmatisasi:

- Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;
- Koordinasi dengan APH untuk penyelesaian ABH.

2

Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus:

- Gerakan bersama untuk melindungi ABK

3

Perlindungan Anak dari Kekerasan & Eksploitasi:

- Kampanye massive untuk pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak

4

Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat Pornografi

- Gugus tugas pencegahan pornografi

- Kampanye BERLIAN (Beri Perlindungan Kepada Anak)
- PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
- TESA 129

TUMBUH KEMBANG ANAK

- Konvensi Hak Anak
- UU Nomor 23 Tahun 2002
- UU Nomor 35 Tahun 2014
- UU Nomor 1 Tahun 2017



**Klaster 5 KHA
Perlindungan Khusus**

Isu yang ditangani meliputi perlindungan terhadap:

- Pemenuhan Hak Sipil & Kebebasan Anak
- Lingkungan, Keluarga, & Pengasuhan
- Kesehatan Anak
- Pendidikan Anak

Apa yang sudah dilakukan ?

1

Pemenuhan Hak Sipil & Kebebasan Anak, a.l.:

- Akte kelahiran
- Informasi Layak Anak (ILA)
- Forum Anak/Partisipasi Anak

2

Lingkungan Keluarga & Pengasuhan, a.l.:

- Pencegahan Perkawinan Anak
- Pengasuhan berbasis hak anak
- PAUD
- PUSPAGA
- Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

3

Kesehatan Anak, a.l.:

- Sosialisasi Asi Eksklusif
- Sosialisasi Bahaya Merokok
- Puskesmas Ramah Anak (PRA)
- Pencegahan *stunting*

4

Pendidikan Anak, a.l.:

- Gerakan wajar 12 tahun
- Sosialisasi Rute Aman Sekolah
- Sekolah Ramah Anak (SRA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Elemen penting mendukung keberhasilan pembangunan, termasuk PP, PA dan KG
2. Individu, Kelompok Masyarakat dan atau Organisasi Kemasyarakatan

Tata Kelola PM ->
Sinergi & Kemitraan
Dengan :

PP No.45
Tahun 2017

Organisasi
Kemasyarakatan,
Keagamaan, dan
PT

Organisasi
Profesi

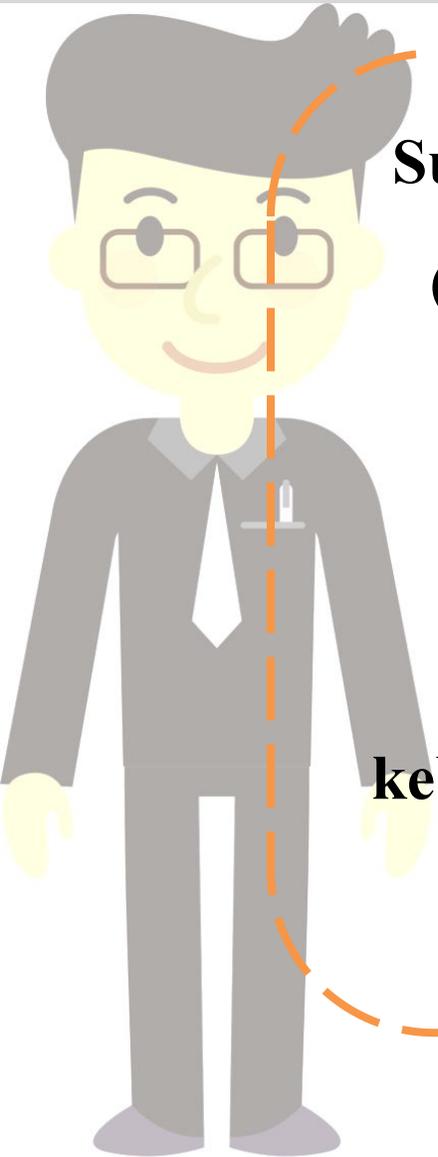
Media

Forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk PP & PA)

PENGARUSUTAMAAN GENDER

(Inpres No.9 Tahun 2000)

Suatu **strategi** untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan **pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan** perempuan dan laki-laki ke dalam **proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi** atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.



PRIORITAS PP-PA



HeForShe



Kampanye HeForShe bertujuan untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta mendorong mereka untuk terlibat dalam upaya mengakhiri isu-isu terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan.

Kata “**akhiri**” pada Tiga Akhiri, lebih dimaknai sebagai upaya mempersempit peluang terjadinya

Prinsip dasar dalam SDGs

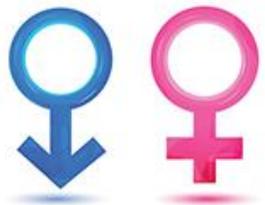
➔ No One Left Behind



- Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa terkecuali;
- Laki-laki dan Perempuan memiliki kontribusi pada pencapaian Indikator kualitas hidup manusia;
- Faktanya Perempuan saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan;
- Jika ada yang tertinggal (termasuk perempuan) maka capaian Indikatornya akan rendah.



Kesetaraan Gender harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDGs

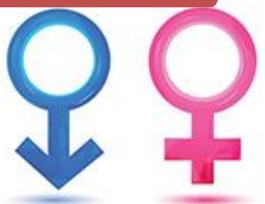


ISU GENDER DALAM KOMITMEN GLOBAL SDG's



Lebih dari 120 indikator yang relevan dengan gender.

17 indikator merupakan indikator yang langsung terkait dengan gender karena berada pada Tujuan 5.



TARGET SDG'S TERKAIT KESETARAAN GENDER

GOAL 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

5.1

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.

5.2

Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik & pribadi, termasuk perdagangan manusia & eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

5.3

Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksaserta sunat perempuan.

5.5

Menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

5.6

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population & Development* and the *Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

5.a

Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan & kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain. Jasa keuangan, warisan dan sumberdaya alam, sesuai dengan hukum nasional.

5.5

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.



TERIMA KASIH

